



Jambura Accounting Review

Journal homepage: <http://jar.fe.ung.ac.id/index.php/jar>

E-ISSN 2721-3617

Sistem Informasi Akuntansi BMD Terhadap Pengelolaan Asset Daerah Pada DPPKAD Kota Gorontalo

Irawati Pangat^a, Tri Handayani Amaliah^b, Lukman Pakaya^c

^{a, b, c} Universitas Negeri Gorontalo, Jl. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo, Gorontalo 96128, Indonesia,

email: irawati@gmail.com^a, tri.handayani.amaliah@gmail.com^b, lukmanpakaya@ung.ac.id^c

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received 27 – 01 – 2020

Revised 20 – 02 – 2020

Accepted 21 – 02 – 2020

Kata Kunci:

Sistem Informasi Akuntansi Barang, Pengelolaan Asset Daerah

Keywords:

Goods Accounting Information System, Regional Asset Management

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh sistem informasi akuntansi barang milik daerah terhadap pengelolaan asset daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi sederhana. Hasil dalam penelitian ini adalah sistem Informasi Akuntansi Barang Milik Daerah berpengaruh terhadap Pengelolaan Asset Daerah. Variabel independen yang diteliti memiliki pengaruh kontribusi sebesar 70,1% terhadap variabel Pengelolaan Asset Daerah, sedangkan 29,9% lainnya dipengaruhi faktor-faktor lain diluar variabel yang diteliti.

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the effect of regional accounting information systems on regional asset management. The method used in this study uses quantitative methods using simple regression analysis. The results in this study are the Regional Accounting Information System influences the Regional Asset Management. The independent variable studied had a contribution of 70.1% to the Regional Asset Management variable, while the other 29.9% was influenced by other factors outside the variable under study.

PENDAHULUAN

Saat ini peran sistem informasi dalam menunjang kegiatan operasional dan pendukung pengambilan keputusan menjadi sangat penting bagi suatu organisasi. Menurut O'Brein (2005:41), sistem informasi terdiri dua gabungan kata yaitu sistem yang merupakan kumpulan elemen yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dan informasi yang merupakan data yang telah diolah sedemikian rupa, sehingga menghasilkan sesuatu yang dapat dimanfaatkan atau digunakan oleh pemakai akhir untuk tujuan tertentu.

Pengamanan aset mutlak dilakukan dengan melengkapi aset dimaksud dengan dokumen legal. Di samping itu, aset daerah merupakan kekayaan yang dapat berperan sebagai jaminan pembangunan daerah. Masalah yang umum terjadi terhadap aset pemerintah, yakni belum lengkapnya dokumen, bahkan tidak ada sama sekali. Tidak jarang pula, aset daerah tersebut hilang akibat berbagai alasan tertentu. Ketidajelasan status aset yang dikelola Selain terdapat di pusat, karena masih banyak juga aset pemerintah yang tersebar di berbagai daerah. Kurang optimalnya penggunaan Barang Milik Negara dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi pemerintah karena adanya kekurangan cermatan sejak dari perencanaan pengadaan barang milik negara atau daerah yang berakibat pada kurang optimalnya fungsi penggunaan aset. Meminimalisasi terjadinya kerugian Negara sebagai akibat dari pengelolaan barang milik Negara. Banyak terdapat aset – aset yang mempunyai masa pakai masih sedikit namun yang banyak mengalami kerusakan ataupun tidak dapat digunakan. Kurang optimalnya pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Negara dalam rangka menghasilkan pendapatan Negara. Pihak pengelola tidak mempunyai kapabilitas yang baik dalam memfungsikan – gunakan aset. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah adalah sistem terpadu yang menggabungkan prosedur manual dengan proses elektronik dalam pengambilan data pembukuan dan pelaporan semua transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas seluruh entitas Pemerintah Daerah.

Berdasarkan pengamatan awal bahwa Secara garis besar pengelolaan barang milik daerah di Pemerintahan Daerah Kota Gorontalo dalam pengelolaan keuangan terbagi dalam 2 (dua) transaksi yaitu transaksi barang dan transaksi Kontruksi Dalam Pengerjaan. Transaksi barang pada prinsip menangani pengelolaan aset yang mencakup pencatatan mulai dari saldo awal, perolehan, perubahan, penghapusan, penghentian penggunaan, sampai pencatatan kode ruangan serta Kartu Inventaris Barang (KIB) terkait dengan penanganan aset yang sudah selesai proses pengadaannya dan sudah siap untuk digunakan. Konstruksi dalam pengerjaan (KDP) adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan atau proses perolehannya belum selesai pada akhir periode akuntansi. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi dan jaringan; dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan sampai dengan tanggal pelaporan belum selesai pengerjaannya. Banyak terdapat asset-aset yang mempunyai masa pakai masih sedikit namun yang banyak mengalami kerusakan ataupun tidak dapat digunakan. Kurang optimalnya pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Negara dalam rangka menghasilkan pendapatan Negara. Pihak pengelola tidak mempunyai kapabilitas yang baik dalam memfungsikan gunakan aset (DPPKAD, 2016)

Kualitas suatu sistem dinilai baik apabila berjalan sesuai prosedur, apabila mampu mengimplementasikan kriteria dan standar yang telah di tentukan berbagai pengguna yang ada didalam organisasi baik secara individual maupun secara kelompok. Informasi tersebut berkualitas apabila akurat, tepat waktu, lengkap dan ringkas (dalam Nugroho, 2016:24). Bodnar dan Hopwood (2018:12), menyatakan bahwa suatu keberhasilan sistem dalam menghasilkan informasi akuntansi sangat ditentukan pada saat menimplentasikan keahliannya pada sistem informasi. Faktor perilaku yang mempengaruhi sistem informasi akuntansi meliputi: penggunaan teknologi informasi, keahlian pemakai, keterlibatan pemakai, pelatihan, dukungan manajer puncak dan konflik pemakai. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Barang Milik Daerah terhadap Pengelolaan Asset Daerah pada DPPKAD Kota Gorontalo”.

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

1. Pengertian Sistem Informasi Akuntansi

Sistem informasi akuntansi menurut Mulyadi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan (2001). Sedangkan menurut Widjajanto (2001), sistem informasi akuntansi adalah susunan formulir, catatan, peralatan termasuk komputer dan perlengkapannya serta alat komunikasi, tenaga pelaksanaannya dan laporan yang terkoordinasi secara erat yang didesain untuk mentransformasikan data keuangan menjadi informasi yang dibutuhkan manajemen.

Pengertian sistem informasi akuntansi menurut Krismiaji (2010:4) adalah sebagai berikut: “Sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem yang memproses data dan transaksi guna menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengoperasikan bisnis”. Pengertian sistem informasi menurut Anggadini (2016:57) adalah sebagai berikut: “Sistem informasi akuntansi dapat pula didefinisikan sebagai suatu sistem yang berfungsi untuk mengorganisasi formulir, catatan dan laporan yang dikoordinasi untuk menghasilkan informasi keuangan yang dibutuhkan dalam pembuatan keputusan manajemen dan pimpinan perusahaan dan dapat memudahkan pengelolaan perusahaan”.

Menurut Wilkinson dan Cerullo (dalam Anggadini, 2016:57), informasi akuntansi adalah sebagai berikut: “Sistem Informasi Akuntansi merupakan struktur yang menyatu dalam suatu entitas, yang menggunakan sumber daya fisik dan komponen lain, untuk merubah data transaksi keuangan/akuntansi menjadi informasi akuntansi dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan akan informasi dari para pengguna atau pemakainya (*users*).”

Sistem informasi akuntansi (SIA) merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai formulir, catatan dan laporan yang telah disusun dan menghasilkan suatu informasi keuangan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Dengan demikian manajemen perusahaan dapat melihat keuangan dengan jelas melalui sistem

tersebut. Selain itu, manajemen juga dapat mengontrol kinerja dari sistem yang digunakan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dijelaskan bahwa sistem informasi akuntansi merupakan kumpulan sistem-sistem yang saling berhubungan yang melibatkan sumberdaya seperti manusia dan peralatan yang saling bekerja sama untuk mengelola data ekonomi kedalam bentuk informasi keuangan yang dapat digunakan bagi perusahaan. Jadi pada dasarnya sistem informasi akuntansi merupakan suatu sistem yang digunakan untuk memudahkan perusahaan dalam memproses data dan transaksi keuangan sehingga dapat menghasilkan suatu informasi keuangan yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan dalam pengambilan keputusan.

2. Pengelolaan Aset Daerah

Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi terhadap pengelolaan barang daerah perlu diatur pedoman kerjanya, untuk itu telah dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut dimaksudkan bahwa barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah. Di dalam lampirannya dijelaskan tentang pengertian barang milik daerah yaitu semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.

Pengelolaan barang daerah adalah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang daerah yang meliputi, perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindah-tanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan, dan tuntutan ganti rugi (Pasal 4 ayat 2 Permendagri No.17 Tahun 2007). Sedangkan mengenai manajemen aset seperti telah diuraikan sebelumnya bahwa manajemen aset merupakan lanjutan dari proses manajemen barang atau manajemen material yang meliputi kegiatan-kegiatan: a). inventarisasi aset; b). legal audit; c). penilaian aset; d). optimalisasi aset; e). pengembangan System Informasi Manajemen Aset (SIMA) dalam Pengawasan dan Pengendalian Aset

Dalam Peraturan Daerah Kota Gorontalo No. 3 tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, dimana dalam pasal 3 dijelaskan bahwa tujuan pengelolaan barang milik daerah adalah untuk:

- a. Menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta dalam rangka melaksanakan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah;
- b. Terwujudnya akuntabilitas dalam pengelolaan barang milik daerah;

- c. Terwujudnya pengelolaan barang milik daerah yang tertib, efisien dan efektif, fleksibel dan optimal serta sesuai dengan asas-asas pengelolaan barang milik daerah.

Untuk mendukung pengelolaan aset daerah secara efisien dan efektif serta menciptakan transparansi kebijakan pengelolaan aset daerah, maka pemerintah daerah perlu memiliki atau mengembangkan sistem informasi manajemen yang komprehensif dan handal sebagai alat untuk menghasilkan laporan pertanggungjawaban. Selain itu, sistem informasi tersebut juga bermanfaat untuk dasar pengambilan keputusan mengenai kebutuhan barang dan estimasi kebutuhan belanja pembangunan (modal) dalam penyusunan APBD, dan untuk memperoleh informasi manajemen aset daerah yang memadai maka diperlukan dasar pengelolaan kekayaan aset yang memadai juga, dimana menurut Mardiasmo (2014:87) terdapat tiga prinsip dasar pengelolaan aset atau kekayaan daerah, yaitu: (a) adanya perencanaan yang tepat; (b) pelaksanaan/pemanfaatan secara efisien dan efektif; (c) pengawasan (monitoring).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun pengertian dari ketiga rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang yaitu sebagai berikut :

a. Pembukuan

Pembukuan adalah rincian pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke daftar barang atau daftar barang pengguna atau kuasa pengguna menurut penggolongan dan kodifikasi barang. Pengguna/kuasa pengguna barang wajib melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP)/Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP). Pengguna/kuasa pengguna barang dalam melakukan pendaftaran dan pencatatan harus sesuai dengan format:

1. Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah;
2. Kartu Inventaris Barang (KIB) B Peralatan dan Mesin;
3. Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung dan Bangunan;
4. Kartu Inventaris Barang (KIB) D Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
5. Kartu Inventaris Barang (KIB) E Aset Tetap Lainnya;
6. Kartu Inventaris Barang (KIB) F Kostruksi dalam Pengerjaan;
7. Kartu Inventaris Ruang (KIR).

b. Inventarisasi

Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah. Kegiatan inventarisasi dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang akurat, lengkap, dan mutakhir mengenai kekayaan daerah yang dimiliki atau di kuasai oleh pemerintah daerah.

Untuk dapat melakukan inventarisasi aset daerah secara objektif dan dapat diandalkan, pemerintah daerah perlu memanfaatkan profesi auditor atau jasa penilai yang independent. Dari kegiatan inventarisasi disusun buku inventaris yang menunjukkan semua kekayaan daerah yang bersifat kebendaan, baik yang bergerak

maupun yang tidak bergerak. Buku inventaris tersebut memuat data meliputi lokasi, jenis/merk tipe, jumlah, ukuran, harga, tahun pembelian, asal barang, keadaan barang, dan sebagainya.

c. Pelaporan

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 17 tahun 2007. Pelaporan adalah proses penyusunan laporan barang setiap semester dan setiap tahunan setelah dilakukan inventarisasi dan pencatatan. Pengguna menyampaikan laporan pengguna barang semesteran dan tahunan kepada Kepala Daerah melalui pengelola. Sementara pembantu pengelola menghimpun laporan menjadi Laporan Barang Milik Daerah (LBMD).

METODE PENELITIAN

Peneliti memilih lokasi yang menjadi objek penelitian di Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Gorontalo merupakan salah satu instansi pemerintah yang mengelola keuangan dan asset daerah

Penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan yang di mulai dari bulan Oktober sampai dengan bulan November 2019

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Desain penelitian menggambarkan adanya prosedur-prosedur yang memungkinkan penulis dapat menguji hipotesis penelitian, sehingga dapat mencapai kesimpulan-kesimpulan yang valid mengenai hubungan atau adanya saling mempengaruhi antara variabel bebas dengan variabel terikat pada penelitian ini.

Sampel dalam penelitian ini yaitu pegawai pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Gorontalo yang berjumlah 53 orang pegawai. Teknik pengumpulan data melalui kuesioner dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada pihak yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Teknik analisis data yaitu yaitu uji validitas, reliabilitas dan pengujian regresi linear sederhana dimaksudkan untuk mengukur hubungan fungsional anatar variabel-variabel dalam penelitian

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Seluruh pertanyaan yang digunakan dalam mengukur Sistem Informasi Akuntansi Barang Milik Daerah dan Pengelolaan Aset telah memiliki ketepatan yang baik. Ini terlihat dari besarnya koefisien validitas yang dihasilkan oleh setiap item pertanyaan yang semuanya valid. Interpretasi untuk melihat hasil validitas yaitu perhatikan nilai Pearson Correlation. Jika nilai Pearson Correlation > R tabel maka dikatakan valid. Untuk jumlah sampel = 53, nilai R tabel dgn tingkat kepercayaan 0,05 adalah 0,2706.

Nilai koefisien reliabilitas untuk variabel Sistem Informasi Akuntansi Barang Milik Daerah dari hasil di atas adalah sebesar nilai cronbach = 0,956 dikatakan reliabel jika nilainya > 0,5 sehingga menunjukkan hasil pengukuran yang dihasilkan oleh instrumen yang digunakan menunjukkan konsistensi yang cukup baik pada setiap responden. Atau dengan kata lain, persepsi responden mengenai pertanyaan yang digunakan sudah homogen.

Hasil analisis di atas menunjukkan hasil uji kolmogorov smirnov dikatakan

normal jika $p > 0,05$; ($p > 0,05$) artinya sebaran data normal dengan nilai signifikansi sebesar didapatkan $p = 0.866$. Jika dibandingkan dengan nilai alpha yang digunakan ($0,05$) maka nilai signifikansi ini masih lebih besar dari alpha sehingga H_0 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data variabel dependen (Pengelolaan Asset Daerah) telah berdistribusi normal.

$$= 14.032 + 0.812X$$

Ket :

Y = Pengelolaan Asset Daerah

X = Sistem Informasi Akuntansi Barang Milik Daerah

Perhatikan nilai B pada tabel Coefficients di atas, didapatkan persamaan regresi sbb:

- a. Tanda koefisien regresi untuk variabel X yang positif menunjukkan terdapat pengaruh yang positif dari Sistem Informasi Akuntansi Barang Milik Daerah (X) terhadap Pengelolaan Asset Daerah (Y).
- b. Semakin baik Sistem Informasi Akuntansi Barang Milik Daerah maka akan memberikan dampak terhadap peningkatan Pengelolaan Asset Daerah. Setiap peningkatan Sistem Informasi Akuntansi Barang Milik Daerah sebesar satu satuan akan meningkatkan Pengelolaan Asset Daerah sebesar 0.812 satuan atau 81,2%.

nilai t-hitung untuk variabel Sistem Informasi Akuntansi Barang Milik Daerah adalah sebesar 8,364 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi ini masih lebih kecil dari nilai alpha ($0,05$) sehingga H_0 ditolak. Dengan kata lain pada tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari Sistem Informasi Akuntansi Barang Milik Daerah terhadap Pengelolaan Asset Daerah.

Setelah diketahui bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari Sistem Informasi Akuntansi Barang Milik Daerah terhadap Pengelolaan Asset Daerah maka langkah selanjutnya adalah menganalisis besar pengaruh yang ditimbulkan oleh Sistem Informasi Akuntansi Barang Milik Daerah terhadap Pengelolaan Asset Daerah yang mereka peroleh. Untuk keperluan tersebut digunakan analisis koefisien determinasi.

Pencarian t tabel dicari pada $\alpha = 5\%$: $2 = 2,5\%$ (uji 2 sisi) dengan derajat kebebasan (df) $n - k - 1$ atau $53 - 1 - 1 = 52$ (n adalah jumlah kasus dan k adalah jumlah variabel independen). Dengan pengujian 2 sisi (signifikansi = $0,25$) hasil diperoleh untuk t tabel sebesar 11.158, atau $11.158 > 1,675$ (t hitung lebih besar dari t tabel). Berdasarkan pengujian tersebut maka disimpulkan bahwa Sistem Informasi Akuntansi Barang Milik Daerah pada DPPKAD Kota Gorontalo memiliki pengaruh terhadap Pengelolaan Asset Daerah.

Hasil perhitungan koefisien determinasi untuk model regresi antara Sistem Informasi Akuntansi Barang Milik Daerah dengan Pengelolaan Asset Daerah adalah $0,696$ dan disederhanakan dengan $R^2 = 0,701$. Nilai ini berarti bahwa sebesar 70,1% variasi Pengelolaan Asset Daerah pada DPPKAD Kota Gorontalo dapat diterangkan oleh baik buruknya Sistem Informasi Akuntansi Barang Milik Daerah. Artinya bahwa variabel independen yg diteliti memiliki pengaruh kontribusi

sebesar 70,1% terhadap variabel Pengelolaan Asset Daerah, sedangkan 29,9% lainnya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar variabel yang diteliti.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis statistik dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Hipotesis statistik yang disusun diterima dimana H1 diterima dan Ho ditolak, atau Sistem Informasi Akuntansi Barang Milik Daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Asset Daerah pada DPPKAD Kota Gorontalo. Sistem Informasi Akuntansi Barang Milik Daerah berpengaruh terhadap Pengelolaan Asset Daerah. Variabel independen yang diteliti memiliki pengaruh kontribusi sebesar 70,1% terhadap variabel Pengelolaan Asset Daerah, sedangkan 29,9% lainnya dipengaruhi faktor-faktor lain diluar variabel yang diteliti.

2. Saran

Dari kesimpulan yang diuraikan maka pada bab-bab sebelumnya, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Teknologi sistem informasi yang disediakan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebaiknya dapat lebih membangun kepercayaan pemakai teknologi sistem informasi dengan menyediakan teknologi sistem informasi yang selalu diperbaharui sehingga dapat mempercepat penyelesaian pekerjaan.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan menambah jenis variabel bebas, seperti tingkat keterampilan yang dimiliki oleh individu pengguna teknologi sistem informasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2012. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi keuangan daerah*,. Edisi Revisi, Salemba Empat, Jakarta
- Azhar (2017) *The Influence of Accounting Information System Quality to Accounting Information Quality and its Implications to the Good Study Program Governance*. International Business Management 11 (4): 5767-5776, 2017 ISSN: 1993-5250. MedwellJournals, 2017.
- Baridwan, Zaki. 2018. *Sistem Informasi Akuntansi. Cet. Kedua*. Yogyakarta BFPFE.
- Bodnar, George H. dan William S. Hopwood. 2018. *Sistem Informasi Akuntansi*, Edisi 9, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Collier David A & Evans, James R.. 2007. *Operations Management*. International Student Edition, Thomson South-Western.

- Darise. 2015. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi Kedua. PT. Indeks. Jakarta.
- Diana, Anastasia Lilis Setiawati. 2016. *Sistem Informasi Akuntansi, Perancangan, Prosedur dan Penerapan*. Edisi 1. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. BP-Universitas Diponegoro, Semarang.
- Halim Abdul & Syam Kusufi. 2012. *Akuntansi Sektor Publik : teori, konsep dan aplikasi*. Salemba Empat : Jakarta.
- Hall, James A. 2016. *Sistem Informasi Akuntansi*, Edisi 4, Penerbit SalembaEmpat, Jakarta.
- Husen, Umar. 2009. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, EdisiKedua, Jakarta : Rajawali Pers.
- Krismaji. 2012. *Sistem Informasi Akuntansi*, Edisi Kedua, AMP YKPN, Yogyakarta.
- Laudon, Kenneth C dan Jane P. Laudon.2007. *Sistem Informasi Manajemen*. Edisike-10. Terjemahan Chriswan Sungkono dan Machmudin Eka P. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. 2016. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Offset. Yogyakarta
- Mulyadi. 2018. *Sistem Akuntansi*, Edisi Ketiga, Cetakan Keempat, Salemba
- Nugroho, W. 2016. *Sistem Informasi Akuntansi*, AMP YKPN, Yogyakarta
- Romney, Marshall B dan Paul John Steinbart. 2016. *Sistem Informasi Akuntansi* Edisi 9, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Sagara (2015) *The Effect of Implementation Accounting Information System and Competence of Human Resources on the Quality of Financial Reporting*. Research Journal of Finance and Accounting www.iiste.org ISSN 2222-1697 (Paper) ISSN 2222-2847 (Online) Vol.6, No.10, 2015
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung. Alfabeta.
- Supriyanto, 2016. *Analisis Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda) Barang Milik Daerah*. Jurnal Akuntansi Universitas Jember – Vol. 13 No. 2 Desember 2015